

**RILIS PERS INDEF**

**“Pemanasan Debat Kelima: Tantangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”**

Jakarta, 11 April 2019

Debat babak terakhir (debat kelima) Calon Presiden dan Wakil Presiden RI menghadirkan pembahasan mengenai “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi, serta Perdagangan dan Industri”. Persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial dinilai masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Di sisi lain, sektor keuangan negara, investasi, perdagangan dan industri dinilai menjadi solusi dalam mengentaskan persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang dihadapi.

Melihat urgensi tema debat kelima dalam Pemilihan Presiden, maka *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) menyampaikan **Sepuluh permasalahan krusial** bangsa di bidang ekonomi yang diharapkan dapat disentuh dan diberikan solusi dalam debat Pilpres kelima:

**1. Urgensi memperbaiki kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi**

- Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dua dasawarsa ini [20 tahun (2000-2018)] sebesar 5,27 persen yoy. Realisasi laju pertumbuhan ekonomi selama era reformasi ini belum mampu menyamai capaian era Orde Baru. Jika pertumbuhan lima persen yang sudah terjadi dalam 6 tahun ini tidak segera diakselerasi, maka akan sulit bagi Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju. Di sisi lain, mengingat perekonomian Indonesia ‘cepat panas’ atau *overheating*, maka target-target akselerasi pertumbuhan ekonomi harus tetap mempertimbangkan aspek stabilitas.
- Selain masalah kuantitas pertumbuhan ekonomi, dari sisi kualitas juga perlu diperbaiki. Dukungan anggaran negara meningkat, kebijakan stimulus perekonomian tidak kekurangan, posisi sebagai negara layak investasi diperoleh (*investment grade*), namun sayangnya kesemuanya itu belum cukup untuk menjawab tantangan peningkatan angkatan kerja, menurunkan kemiskinan secara lebih signifikan, serta mengurangi ketimpangan.

- Wajah ketimpangan pembangunan tercermin dari bergemingnya pulau Jawa terhadap pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto). Lima tahun lalu (2014) porsi Jawa sudah mencapai 57,4 persen, saat ini (2018) porsi Pulau Jawa justru naik menjadi 58,48 persen dalam pembentukan PDB nasional. Ini menggambarkan bahwa pembangunan masih Jawa sentris.

## **2. Daya beli tidak tergugah, saat inflasi cenderung rendah**

- Tren inflasi rendah yang terjadi saat ini (2,48 persen yoy, Maret 2019) tidak mampu menstimulasi kegiatan ekonomi terutama konsumsi. Hal ini terjadi karena seiring melandainya inflasi, pertumbuhan konsumsi juga mengalami stagnansi.
- Di sisi lain, inflasi yang rendah seharusnya dapat mencerminkan terjangkaunya suku bunga pinjaman untuk melakukan aktivitas ekonomi. Sayangnya, inflasi sudah rendah namun suku bunga pinjaman masih tinggi dan jauh dari jangkauan dunia usaha.

## **3. Kalah saing mengungkit daya saing**

- Perbaikan peringkat kemudahan berbisnis tidak dilirik PMA (Penanaman Modal Asing). Membaiknya peringkat EoDB (*Ease of Doing Business*) belum mampu mendorong peningkatan PMA. Realisasi PMA di Indonesia cenderung menunjukkan penurunan. Pada 2018 realisasi PMA turun dibanding 2017 setidaknya karena dinamika ekonomi global, menjelang tahun politik memunculkan kekhawatiran pada kepastian regulasi pada sektor dengan orientasi jangka panjang (migas, manufaktur, perkebunan), dan transisi perizinan menggunakan OSS.
- Survei terhadap perusahaan-perusahaan di Jepang menunjukkan penurunan popularitas Indonesia sebagai negara tujuan investasi langsung (FDI/*Foreign Direct Investment*) [The Japan Bank for International Cooperation, 2018]. Dalam tiga tahun terakhir ini peringkat Indonesia terus turun. Selain itu jumlah perusahaan di Indonesia juga mulai berkurang.
- Di sisi lain, Vietnam justru terus menunjukkan peningkatan performanya dalam menarik FDI, salahsatunya dari Jepang. Berkebalikan dengan Indonesia, popularitas Vietnam bagi investor Jepang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.
- Peringkat EoDB Vietnam juga lebih baik (ke-69) dari Indonesia (ke-73) pada indikator : *starting a business, dealing with construction permits, getting electricity, enforcing contract, dan protecting investor.*

#### **4. Siapapun Presidennya, impor pasti, dan akan tetap jalan**

- Impor menjadi suatu yang pasti, menghentikannya adalah sesuatu yang utopis. Hal ini disebabkan dua faktor utama diantaranya: (1) semakin rendahnya output di sektor pertanian dan peternakan sementara pertumbuhan penduduk, terutama kelas menengah, terus meningkat; dan (2) sektor industri yang masih mengandalkan bahan baku impor.
- Tingkat dependensi industri terhadap impor masih tinggi. Impor bahan baku masih menyumbang 70 persen dari keseluruhan impor. Ini menunjukkan bahwa industri kita masih tergantung pada bahan baku impor karena lemahnya industri hulu domestik.
- Kontribusi impor konsumsi sudah mencapai 9 persen dalam tiga tahun terakhir, setelah selama 16 tahun berada di posisi 7-8 persen. Impor konsumsi memperlihatkan bahwa industri dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri diakibatkan dengan semakin bergesernya struktur ekonomi ke arah jasa.
- Neraca perdagangan non-migas Indonesia pada 2018 tercatat mengalami surplus 3,96 miliar USD, terendah sejak 2012 (3,92 miliar USD). Jika tidak ada penanganan serius dan perencanaan industri ke depan, maka neraca perdagangan non-migas terancam defisit pada satu hingga dua tahun ke depan, mengulangi defisit perdagangan non-migas 1996.

#### **5. Deindustrialisasi adalah hal lumrah, namun di Indonesia terjadi lebih cepat dari negara ASEAN lainnya**

- Meski deindustrialisasi dan transformasi struktural ekonomi merupakan fenomena alamiah dan terjadi secara global, namun demikian deindustrialisasi di Indonesia terjadi cepat. Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia mengalami penurunan porsi manufaktur terhadap PDB sebesar 7 persen, yang mana negara sebaya (*peers*) di ASEAN (Thailand dan Malaysia) tidak lebih dari 4 persen.
- Setidaknya ada tiga hal sebagai akibat dari menurunnya porsi industri manufaktur: (1) turunnya penerimaan perpajakan, padahal manufaktur menjadi sektor tertinggi (30 persen) dalam menyumbang pajak; (2) daya

serap tenaga kerja oleh sektor manufaktur semakin berkurang; (3) secara agregat, pertumbuhan PDB tidak dapat terdongkrak naik secara cepat karena kontribusi maupun pertumbuhan manufaktur turun dan tumbuh semakin lamban.

- Deindustrialisasi diperparah melalui perubahan pola investasi asing (FDI) yang cenderung berada di sektor tersier dibandingkan sekunder.

#### **6. Logistik sekarat, perdagangan tidak terangkat**

- Frekuensi perdagangan di Indonesia masih rendah dibandingkan negara sebaya (*peers*) ASEAN. Indonesia hanya memiliki rasio nilai perdagangan terhadap PDB sebesar 39,54 persen, sementara negara ASEAN seperti Malaysia memiliki 135,9 persen dan Thailand sebesar 121,66 persen.
- Nilai rendah ini salah satunya disebabkan minimnya peran logistik dalam perdagangan. Logistic Performance Index (LPI) 2018 menunjukkan nilai Indonesia sebesar 3,15. Meskipun meningkat dari tahun 2016, namun nilai LPI ini lebih rendah dibandingkan Thailand, Malaysia dan Vietnam.
- Nilai *Trading Across Border* dalam Ease of Doing Business (EODB) di 2018 yang dikeluarkan oleh World Bank (2019) juga menunjukkan nilai terendah se-ASEAN-5 sebesar 67,27. Nilai ini lebih rendah dari rata-rata negara-negara Asia Timur dan Pasifik.

#### **7. Revolusi Industri 4.0 tidak lebih dari sekadar euforia dan gimmick politik**

- Terdapat dua sebab mengapa industri 4.0 hanya dipandang sebagai *gimmick* politik dibandingkan perencanaan ekonomi yang matang: (1) tidak adanya perencanaan yang mendasar mengenai apa yang perlu dikembangkan di sektor prioritas dan tidak ada perencanaan infrastruktur dasar industri 4.0 yaitu *Internet of Things* (IoT) dan (2) tidak ada perencanaan untuk melakukan mitigasi tenaga kerja yang terkena dampak dari pengimplementasian otomatisasi di sektor ini.

#### **8. Rendahnya Kinerja Perpajakan dan peningkatan risiko utang**

- *Tax Ratio* Indonesia mengalami tren penurunan selama periode 2012-2017, lalu pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 11,5 persen. Namun, pencapaian tax ratio tersebut masih jauh dari target tax ratio dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 15,2 persen pada tahun 2018. Belum lagi jika

dibandingkan dengan *tax ratio* sekawasan ASEAN, Indonesia termasuk yang terkecil.

- Rendahnya *tax ratio* disebabkan kecilnya elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap pajak (*tax bouyancy*). Indikator ini mengindikasikan masih rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak serta terjadinya aktivitas *shadow economy* yang menyebabkan kebocoran pajak (Penghasilan Kena Pajak disimpan di luar negeri, *tax competition*, pajak terutang tidak dibayar). Program *tax amnesty* pada tahun 2016 juga tidak terbukti berhasil memperbesar basis pajak di Indonesia, terutama dalam mengembalikan (*repatriasi*) dana WNI di Luar Negeri.
- Penerimaan pajak yang tidak optimal juga tercermin dari *shortfall* pajak yang masih terjadi. Realisasi penerimaan pajak tahun 2017 sebesar 91,23 persen, tahun 2018 sebesar 94,02 persen.
- Meningkatnya risiko utang. Peningkatan rasio utang terhadap PDB berbanding terbalik dengan *tax ratio*, mencerminkan kemampubayaran utang pemerintah semakin menurun. Implikasinya, beban pembayaran bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat semakin tinggi, dari 11 persen (2014) menjadi 17,13 persen (2019).
- Di tengah perbaikan *investment grade*, tingkat imbal hasil (*yield*) SBN Indonesia justru tinggi dan cenderung naik. SBN Indonesia bertenor 10 tahun sebesar 8 persen, paling tinggi dibandingkan SBN kawasan ASEAN Malaysia (4 persen), Filipina (6,2 persen), Thailand (2,2 persen), dan Vietnam (5 persen).
- Ketergantungan utang pemerintah yang bersumber dari SBN semakin tinggi dari 73 persen (2014) menjadi 81,7 persen (2018). Perlu diwaspadai dampaknya terhadap sektor perbankan (*crowding out effect*) yang menyebabkan tergerusnya DPK dan meningkatnya bunga kredit. Di samping itu, porsi SBN Valas meningkat dari 23,64 persen (2014) menjadi 28 persen (2018), ditambah kepemilikan asing terhadap SBN juga memperbesar risiko fluktuasi nilai tukar rupiah.

## 9. Problematika Dana Desa

- Alokasi Dana Desa terus meningkat dari Rp20,8 triliun (2015) menjadi Rp70 triliun (2019). Begitupun proporsi Dana Desa terhadap Transfer ke Daerah yang terus naik dari 3,45% (2015) menjadi 8,47% (2019). Namun, kenaikan dana desa tidak berbanding lurus dengan peningkatan indikator sosial di perdesaan. Buktinya, terjadi tren kenaikan ketimpangan di desa dari 0,316

(Sep'16) menjadi 0,324 (Mar'18), meski mulai turun per Sep'18 menjadi 0,319. Lebih spesifik lagi, masih ada 10 Provinsi dengan tingkat ketimpangan perdesaan yang lebih tinggi dibandingkan level nasional (Yogyakarta, Jatim, NTB, NTT, Sulut, Sulsel, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua, Papua Barat)

- Selain itu, tingkat kemiskinan di desa relatif masih tinggi yaitu 13,1% (Ags'2018), 2 kali lebih besar dibandingkan tingkat kemiskinan di kota sebesar 6,89%. Tingkat pengangguran di desa juga mengalami kenaikan dari 4,01% (Ags'17) menjadi 4,04% (Ags'18).
- Janji menaikkan Dana Desa jangan sampai menjadi alat politik, karena faktanya masih banyak persoalan pemanfaatan Dana Desa, termasuk kasus korupsi Dana Desa. Buktinya, ICW mencatat ada 96 kasus korupsi anggaran desa pada tahun 2018 dengan total kerugian negara sebesar Rp37,2 miliar.
- Namun masih ada berbagai persoalan dalam pengelolaan Dana Desa; i) Penyerapan dan pelaksanaan Dana Desa yang lambat, ii) Penggunaan Dana Desa kurang berkualitas, iii) Masalah tata kelola keuangan yang rumit, iv) Minimnya kreatifitas Desa dalam mendesain program, v) Pengawasan Dana Desa yang belum optimal (Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2018).

#### **10. Inkonsistensi Kebijakan Subsidi Energi**

- Inkonsistensi kebijakan realokasi belanja konsumtif (subsidi energi) menjadi belanja produktif (infrastruktur). Pada Tahun 2015, subsidi energi dipangkas hingga 65,16 persen (dari Rp342 triliun tahun 2014 menjadi Rp119 triliun tahun 2015). Penurunan subsidi energi terus berlanjut pada tahun 2016 (-10,33 persen) dan tahun 2017 (-8,61 persen). Namun, pada tahun 2018 subsidi energi kembali melonjak hingga 57 persen, dan tahun 2019 (4,23 persen).
- Pembengkakan subsidi energi terjadi karena faktor kenaikan harga minyak mentah dunia dan depresiasi Rupiah. Agar subsidi energi tidak terus melonjak, pemerintah perlu membenahi targetting penerima subsidi agar lebih tepat sasaran, seperti Gas 3kg, pelanggan listrik golongan 900VA yang mampu.
- Selain itu, komitmen pemerintah menurunkan subsidi energi secara gradual mestinya juga diikuti dengan pembangunan infrastruktur untuk Energi Baru Terbarukan (EBT) demi mencapai target bauran EBT sebesar 23% pada 2025.